

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terhadap iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan nasional. Pembangunan di dalam gampong menjadi yang sangat penting diperhatikan dalam pembangunan nasional. Pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam hal penyelenggaraan sebuah pemerintah. Dalam penyelenggaraan membutuhkan sumber keuangan dalam gampong salah satunya sumber keuangan dana gampong itu sendiri (Kusrawan, 2021).

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun gampong lebih maju lagi dari sebelumnya. Salah satu misi pemerintahan tingkat kecamatan adalah untuk membangun daerah gampong yang bisa di capai oleh masyarakat untuk pemberdayaan yang meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha milik gampong. Tersedia sarana fasilitas untuk mendukung perekonomian dalam gampong, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi di dalam gampong bertujuan untuk memberikan peluang untuk

kecamatan dewantara supaya kemampuan didalam gampong menjadi tulang punggung ekonomi regional dan nasional (Firmansyah, 2018).

Dana gampong merupakan dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dan ditujukan kepada gampong untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahannya, pelaksanaan pembangunannya, pembinaan masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat yang ada dalam gampong. Dalam penggunaannya, dana gampong yang kini di transfer kepada seluruh gampong setiap tahunnya dari kabupaten ke kecamatan baru kesetiap gampong dan dana tersebut setiap tahunnya harus di pertanggung jawabkan dan pengelolaannya juga dilakukan secara mandiri (Kusrawan, 2021).

(Risqi, M. D., & Murahman, M. 2023) Untuk itu didalam anggaran pendapatan belanja Negara-perubahan (APBN-P) mengalokasikan dana sebesar Rp. 20,776 Triliun bagi 74.093 desa yang berada di lingkup NKRI dan pada setiap tahunnya akan bertambah bahkan mencapai 1 millyar untuk satu desa. Maka dari itu pemerintah desa dituntut untuk mandiri dalam pengelolaan dana desa yang didalamnya terdapat pengelolaan keuangan desa dan kekayaan yang dimilikinya. Dan dengan begitu desa juga dituntut untuk trasparan, akuntabel dan pertisipatif dengan artian semua laporan tentang keuangan desa dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Abdul dan Muhammad (2019:163) efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan. Efisiensi sangat penting karna dapat menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya didalam melakukan suatu aktivitas maupun kegiatan, selain itu efisiensi juga dapat memaksimalkan terbuang percuma.

Menurut bastian (2015) efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas harus diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dinilai efektif apabila output yang di hasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Efektivitas sangat penting untuk diterapkan karena apabila melakukan suatu kegiatan atau efektivitas, harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Efektivitas menjadi tolak ukur atas berhasil atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan.

Salah satu pendekatan yang di harapkan bisa mengerakkan roda perekonomian pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang di kelola sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat desa, melalui badan usaha milik gampong (BUMG). BUMG adalah suatu lembaga usaha gampong yang dikelola pemerintah gampong bersama masyarakat gampong dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian gampong, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan pontensi yang ada di gampong (Sujarweni & Jaya, 2019).

Pengalokasian dana gampong terhadap salah satu bentuk tanggung jawab aparat gampong atau pemerintah gampong dalam melakukan anggaran. Gampong sebagai salah satu unit yang sangat penting bagi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang atau kepentingan dan kebutuhannya, mempunyai peran yang sangat strategis. Khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan *public* dan peningkatan pendapatan mayarakat demi mewujudkan majunya suatu gampong tersebut. Guna

mewujudkan dana gampong di kecamatan dewantara kita harus tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, dari pemerintah pusat atau kecamatan dewantara telah mengalokasikan dana untuk setiap gampong untuk membangun gampong lebih maju dan berkembang.

BUMDes sebagai badan hukum, di bentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun dimasyarakat desa. Pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam meningkatkan pendapatan desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa serta agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat (mulyanto, 2022).

Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan dalam perekonomian secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional sebagai organisasi ekonomi. Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menngerakkan roda perekonomian di dalam gampong adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat di gampong. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di dalam gampong. Maka kepemilikan lembaga gampong dan kontrol

bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat salah satunya yaitu melalui badan usaha milik gampong.

Pengembangan basis ekonomi di gampong sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat gampong dalam mengelola dan menjalankan misi ekonomi di gampong. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di gampong tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi gampong mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah menerapkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik gampong, sesuai, permendagri ini berkaitan langsung dengan BUMG. Dalam arti diaturnya desain BUMG secara detail, keputusan baru ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di dalam gampong melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat gampong yaitu badan usaha milik gampong (BUMG) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian gampong.

Lahirnya BUMG sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi gampong berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong. Pengelolaan

BUMG sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat gampong, yaitu dari gampong, oleh gampong, untuk gampong. Cara kerja BUMG adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi gampong.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemerintah pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa terdapat program bantuan keuangan kepada pemerintah untuk pengembangan BUMG.

Badan usaha milik gampong (BUMG) dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Dalam hal penyusunan laporan keuangannya maka badan usaha milik gampong (BUMG) harus mengacu pada pedoman umum yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau sering juga disebut dengan istilah SAK ETAP. Dalam SAK ETAP (2013) pada bab 3 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bahwa badan usaha milik gampong (BUMG) harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP.

Berdasarkan hasil observasi dengan aparat pemerintahan dikecamatan dewantara terdapat 15 gampong diantara Keude Kreung Geukuh, Tambon Baroh, Tambon Tunong, Paloh Gadeng, Paloh Lada, Uteun Gelinggang, Pulo Rungkom, Paloh Igeuh, Bangka Jaya, Ulee Pulo, Ulee Reuleung, Geulumpang

Sulu Barat, Geulumpang Sulu Timur, Bluka Tebai, Lancang Barat. Masing-masing gampong tersebut mendapatkan anggaran BUMG dari dana desa pertahunnya, jika dilihat dari pontensinya seluruh gampong ada BUMG hanya saja berapa gampong yang ada dikecamatan dewantara tidak semua BUMG tersebut maju dan berkembang dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Anggaran Alokasi dana BUMG Kecamatan Dewantara

No	Jenis usaha BUMG	Lokasi		Anggaran (Rp)
		Kecamatan	Gampong	
1	Simpan pijam, apotik	Dewantara	Keude Kreung Gekuh	200.000.000
2	Percetakan/ <i>Printing</i>	Dewantara	Lancang Barat	200.000.000
3	Sewa Kursi, Tenda	Dewantara	Uteun Gelinggang	50.000.000
4	Sewa toko, pangkala gas	Dewantara	Pulo Rungkom	400.000.000
5	Simpan pinjam, sewa kursi dan tenda	Dewantara	Bangka jaya	100.000.000
6	Lanca garam	Dewantara	Bluka tebai	40.000.000

Sumber : Dana BUMG kecamatan Dewantara

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dana BUMG dari ke kecamatan Dewantara sudah mengetahui mengenai program BUMG berdasarkan program pemerintahan sebelumnya. Namun sosialisasi yang kurang, muncul ketegangan dari masyarakat terutama dari pemerintahan gampong untuk pembentukan BUMG yang dianggap rumit. oleh karena itu, melalui program penyuluhan pengembangan badan usaha milik gampong yang ada di kecamatan dewantara diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mendirikan BUMG dan sarana untuk menjadikan gampong lebih maju lagi dan mandiri.

Badan usaha milik gampong di harapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di dalam gampong. Asset yang ada di gampong harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat gampong. Substansi dan filosofi badan usaha milik gampong (BUMG) harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini badan usaha milik gampong (BUMG) akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli gampong, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran badan usaha milik gampong (BUMG) sebagai instansi payung dalam menaungi. Upaya ini penting dalam rangka mengurangi peran *free rider* yang sering kali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui *praktek rent* (Nurcholis, 2011:88).

Permasalahan yang sering dialami oleh badan usaha milik gampong (BUMG) adalah hampir dari separuh lebih badan usaha milik gampong di Indonesia mati suri. Minimnya kemampuan pengelolaan serta lemahnya pembinaan dari aparat desa serta rasa ketidak pedulian masyarakat gampong dan pengelolaan dana gampong yang tidak efisien mengakibatkan badan usaha milik gampong (BUMG) yang ada di kecamatan dewantara tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Strategi pengembangan ekonomi di gampong yang ada di kecamatan dewantara dilakukan melalui pendirian badan usaha milik gampong (BUMG) yang merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Badan usaha milik gampong (BUMG) merupakan usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah gampong serta tidak lagi didirikan atas instruksi pemerintah, tidak dikuasai kelompok tertentu serta dalam

menjalankan usahanya untuk kepentingan hidup orang banyak dalam sebuah gampong. Badan usaha milik gampong (BUMG) diharapkan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru pada gampong.

Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lihat mengenai fenomena yang terjadi di setiap gampong yang ada di kecamatan dewantara yaitu lembaga dan perangkat gampong sudah mengetahui mengenai program BUMG berdasarkan program pemetintah sebelumnya, namun sosialisasi yang kurang, muncul ketegangan dari masyarakat terutama dari pemerintah gampong untuk membentuk BUMG yang dianggap rumit, fenomena lain yang terjadi di setiap gampong yaitu kurangnya rasa kepedulian masyarakat gampong dalam pertumbuhan BUMG, hal ini disebabkan karna kurangnya pembinaan dari aparat gampong mengenai pentingnya BUMG bagi setiap gampong serta sarana untuk menjadikan gampong mandiri serta lemahnya kemampuan pengelolaan keuangan dana gampong yang menyebabkan percepatan pertumbuhan BUMG.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam suatu penulisan dengan memilih judul “**Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Terhadap Peneglolaan Dana BUMG Di Kecamatan Deawantara**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut,dapat diidefikasi masalah yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan dana BUMG dikecamatan dewantara sudah efisien ?
2. Apakah pengelolaan dana BUMG dikecamatan dewantara sudah efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efesiensi pengelolaan dana BUMG dikecamatan dewantara.
2. untuk mengetahui tingkat efektif pengelolaan dana BUMG di kecamatan dewantara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah kesan keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan manajemen dan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan peneliti ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengatahuan, khususnya terhadap pembahasan mengenai progam BUMG serta sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya yang tertarik.